

Analisis Kebijakan Pendidikan Inggris Serta Perbandingan Dengan Pendidikan Di Indonesia

Hikmah Mulyanti, Lukman, Robby Setiawan, Sistya Pratiwi, Ika Kurnia Sofiani
STAIN Bengkalis

hikmahmulyanti03@gmail.com, lukmanpambang@gmail.com, kikyriani12@gmail.com,
sistya pratiwi003@gmail.com, ikur.wafie@gmail.com

Alamat : Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi email : hikmahmulyanti03@gmail.com

Abstract: *discusses the analysis of education policy in England and compares it with the education situation in Indonesia. With a focus on England as a developed country, this research maps various aspects of education policy such as curriculum, funding, assessment, and follow-up after formal education. Meanwhile, education in Indonesia, as a developing country, is also experiencing significant developments in its education system. Through comparative analysis, this research evaluates the differences and similarities between the two countries, including aspects of access, quality and relevance of education. A literature review involving key references such as government reports and UNESCO publications formed the basis of this research. The results of the analysis are expected to provide insight into education policies in both countries, as well as clarify challenges and opportunities in improving the quality of education.*

Keywords: *education policy, England, Indonesia, comparison, quality of education.*

Abstrak: Analisis kebijakan pendidikan di Inggris dan membandingkannya dengan situasi pendidikan di Indonesia. Dengan fokus pada Inggris sebagai negara maju, penelitian ini memetakan berbagai aspek kebijakan pendidikan seperti kurikulum, pendanaan, penilaian, dan tindak lanjut setelah pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan di Indonesia, sebagai negara berkembang, juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem pendidikannya. Melalui analisis perbandingan, penelitian ini mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara kedua negara, termasuk aspek akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Tinjauan literatur yang melibatkan referensi utama seperti laporan pemerintah dan publikasi UNESCO menjadi landasan penelitian ini. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan tentang kebijakan pendidikan di kedua negara, serta memperjelas tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, Inggris, Indonesia, perbandingan, kualitas pendidikan.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Setiap negara memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda-beda, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di masing-masing negara. Dalam konteks ini, sangat menarik untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Inggris dan membandingkannya dengan pendidikan di Indonesia.

Inggris, sebagai salah satu negara maju dengan sistem pendidikan yang terkenal, telah menjalankan berbagai kebijakan pendidikan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, pendanaan, penilaian, dan tindak lanjut setelah pendidikan formal. Melalui analisis kebijakan pendidikan di Inggris,

kita dapat memahami pendekatan yang diambil oleh negara tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang juga telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem pendidikannya. Sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di Indonesia. Dalam analisis ini, kita dapat membandingkan kebijakan pendidikan di Inggris dengan pendidikan di Indonesia untuk melihat perbedaan, kesamaan, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua negara.

Berikut akan diuraikan gambaran tentang sistem pendidikan di Inggris, termasuk kurikulum, kebijakan pendidikan, dan aspek lainnya yang kemudian akan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa kontribusi dapat diberikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan sebagai alat inti, dengan didukung alat bantu berupa buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan fokus topik yang diangkat oleh peneliti. Melakukan penelitian dan analisis literatur ilmiah peneliti Sumber data merujuk pada sumber informasi yang digunakan dalam suatu pertanyaan penelitian mencakup segala informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Itulah sebabnya, tidak semua informasi atau keterangan dapat dianggap sebagai data penelitian. Data sendiri hanya mencakup bagian tertentu dari informasi, yaitu aspek-aspek yang terkait langsung dengan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan di Inggris

Sistem pendidikan di Inggris terbagi menjadi empat negara yang bersatu, yakni England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang mandiri di bawah yurisdiksi pemerintahnya masing-masing: Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England, sementara itu, Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales, dan Pemerintah Irlandia Utara memiliki tanggung jawab atas wilayah mereka masing-masing.

a. Kurikulum Nasional

- 1) Kurikulum Dasar Nasional (*National Curriculum*) Kurikulum ini menetapkan standar pembelajaran yang harus diikuti oleh semua sekolah di Inggris. Itu mencakup mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Inggris, Sains, Sejarah, dan juga mata pelajaran tambahan seperti Seni, Musik, dan Pendidikan Jasmani.
- 2) Sekolah Otonom (*Academies*)
 - a) Sekolah Akademi (*Academy Schools*) Sekolah Akademi adalah sekolah negeri yang mendapatkan status otonom dan memiliki lebih banyak kewenangan dalam hal pengelolaan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan.
 - b) Sekolah Bebas (*Free Schools*) Sekolah Bebas adalah sekolah baru yang didirikan oleh kelompok masyarakat, yayasan, atau lembaga swasta. Mereka mendapatkan kebebasan dalam pengelolaan dan kurikulum.
- 3) Ujian dan Evaluasi
 - 1) Ujian Nasional (*National Examinations*) Ujian Nasional dilakukan pada tingkat akhir pendidikan sekunder (GCSE) dan tingkat menengah atas (*A-levels*) untuk mengevaluasi pencapaian siswa.
 - 2) *Ofsted Inspections* *Ofsted* (*Office for Standards in Education*) melakukan inspeksi rutin terhadap sekolah-sekolah untuk menilai kualitas pengajaran dan manajemen sekolah.
- 4) Pendidikan Tinggi
 - a) Biaya Kuliah Pada tahun 2012, Inggris mengubah sistem pembiayaan pendidikan tinggi dengan memperkenalkan biaya kuliah yang lebih tinggi dan skema pinjaman siswa.
 - b) Skema Pinjaman Siswa Siswa dapat mengajukan pinjaman untuk membantu membiayai biaya kuliah dan biaya hidup, yang harus mereka bayarkan setelah lulus dengan penghasilan di atas ambang batas tertentu.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Di Inggris

1) Faktor History

Sejarah lembaga pendidikan di *United Kingdom* atau Kerajaan Inggris dimulai pada akhir abad ke-6, pada periode sejarah Inggris *Anglo-Saxon*. Salah satu sekolah yang diduga sebagai yang pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598 di *Canterbury*, England. Pendidikan di Inggris telah menjadi rujukan bagi beberapa universitas di berbagai negara di dunia. *Universitas Oxford* merupakan universitas pertama dan tertua di Inggris, dengan bukti

pembelajaran yang dimulai sejak tahun 1096 dan berkembang pesat pada tahun 1167. Pada tahun 1209, sejumlah ahli dan ilmuwan memutuskan untuk pindah dari *Oxford* ke Cambridge, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Cambridge. Pada tahun yang sama, beberapa cendekiawan dari Universitas Oxford memutuskan untuk berpindah ke Cambridge, yang akhirnya menjadi awal dari berdirinya Universitas Cambridge.

2) Faktor Sosiologi

Departemen Pendidikan merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah-masalah pendidikan yang memengaruhi masyarakat di Inggris hingga usia 19 tahun. Sekitar 93% siswa di Inggris menghadiri sekolah negeri, meskipun terdapat juga sekolah keagamaan, terutama Katolik dan Gereja Inggris. Sekolah Menengah di Inggris sebagian besar bersifat komprehensif, namun ada beberapa daerah yang memiliki sekolah grammar yang selektif. Sekitar 7,2% siswa Inggris menghadiri sekolah swasta yang didanai secara privat. Standar pendidikan di sekolah negeri dipantau oleh Kantor Standar Pendidikan, sementara sekolah swasta dipantau oleh Inspektorat Sekolah Independen.

3) Faktor Letak Geografis

Secara astronomis, Inggris terletak antara 50° LU – 60° LU dan 8° BB – 2° BT, secara geografis terletak di barat daratan Eropa. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai jalur transportasi dan perdagangan antara Eropa dan Amerika. Inggris merupakan negara kepulauan yang terdiri dari England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, beserta beberapa kepulauan lainnya seperti Kanal, Orkney, Skotland, dan Hebrides. Wilayah Inggris dan Irlandia Utara memiliki luas sekitar km². Inggris terpisah dari benua Eropa oleh Selat Dover sejauh 31 km. Secara geografis, Inggris adalah negara maritim yang terletak di pinggir Samudra Pasifik.

4) Faktor Ekonomi

Dari segi ekonomi, Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia, dengan PDB per kapita rata-rata sebesar £ 22.907. Inggris menerapkan sistem ekonomi pasar campuran dengan prinsip pasar bebas dan infrastruktur kesejahteraan sosial. Mata uang resmi Inggris adalah pound sterling (GBP). Pajak di Inggris relatif kompetitif dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Sektor jasa keuangan, terutama di Kota London, memainkan peran penting dalam ekonomi Inggris. Meskipun pada dasarnya merupakan negara industri, sejak tahun 1970-an terjadi penurunan dalam sektor industri berat dan manufaktur, sementara sektor jasa

mengalami peningkatan. Pariwisata juga menjadi kontributor signifikan bagi ekonomi Inggris, menarik jutaan wisatawan asing setiap tahunnya.

2. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan publik dianggap sebagai ilmu relatif baru yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an dan menjadi disiplin yang menonjol dalam bidang administrasi publik dan ilmu politik. Namun, konsep kebijakan publik telah ada sejak zaman awal peradaban manusia. Sejak saat itu, kebijakan publik telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia baik dalam skala individu maupun dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan berkelompok dan bernegara. Sehingga, walaupun kebijakan publik sebagai disiplin ilmu baru muncul pada abad ke-20, eksistensinya telah lama terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada negara. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan, baik itu melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan publik bukanlah semata-mata keinginan pemerintah, tetapi juga harus didasarkan pada tujuan tertentu. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks kebijakan publik diharapkan memiliki alasan atau tujuan yang jelas.

Kebijakan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk aksesibilitas pendidikan, kurikulum, peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan, pendanaan, dan adaptasi terhadap perkembangan global. Beberapa kebijakan penting yang telah diimplementasikan atau sedang dalam proses pengembangan di Indonesia meliputi:

a. Kurikulum 2013

Kurikulum ini diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, peningkatan keterampilan abad ke-21, serta pendekatan ilmiah.

b. Peningkatan Akses Pendidikan

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk melalui program beasiswa, pengadaan sekolah di daerah terpencil, dan insentif bagi keluarga yang mengirim anak-anaknya ke sekolah.

c. Peningkatan Kualitas Guru

Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kualitas guru, termasuk pelatihan dan sertifikasi guru, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan, serta peningkatan kesejahteraan guru.

d. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Pemerintah terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas pendidikan yang sudah ada, dan pengadaan sarana pembelajaran yang modern.

e. Pendidikan Karakter

Selain aspek akademis, penting juga untuk mengembangkan karakter siswa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program pendidikan karakter sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

f. Pendidikan Inklusif

Untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional.

g. Pendanaan Pendidikan

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan guna mendukung berbagai program dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan pendidikan lainnya yakni:

1) Akses Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dengan memperluas jangkauan pendidikan dasar dan menengah. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diperkenalkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

2) Kualitas Pendidikan

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengembangan guru dan peningkatan infrastruktur sekolah. Program sertifikasi guru dan peningkatan kualitas pengajaran menjadi fokus dalam kebijakan pendidikan.

3) Relevansi Pendidikan

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan

pasar kerja dan mengintegrasikan pendidikan vokasional dalam sistem pendidikan.

3. Perbandingan antara Kebijakan Pendidikan di Inggris dan Indonesia

a. Perbedaan

Terdapat perbedaan dalam pendekatan kurikulum, sumber pendanaan, dan sistem penilaian antara Inggris dan Indonesia. Inggris memiliki kurikulum nasional yang lebih terstandarisasi, sementara Indonesia memiliki kurikulum yang lebih regional dan fleksibel. Sumber pendanaan juga berbeda, dengan Inggris mengandalkan pendanaan publik dan swasta, sedangkan Indonesia lebih mengandalkan dana pemerintah. Sistem penilaian di Inggris menggunakan ujian nasional yang ketat, sementara di Indonesia terdapat variasi dalam bentuk penilaian.

b. Kesamaan

Baik Inggris maupun Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Keduanya juga menekankan pentingnya pengembangan guru dan peningkatan infrastruktur sekolah.

c. Tantangan

Keduanya menghadapi tantangan seperti kesenjangan sosial-ekonomi dalam akses pendidikan, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan yang ada di Inggris, meskipun Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal ekonomi dibandingkan dengan negara lain. Dari penjelasan di atas, tampaknya setiap pola pendidikan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, sebagai bangsa yang besar, kita tentu ingin belajar dari negara-negara yang lebih maju. Perbandingan pendidikan ini dapat menjadi referensi bagi kita untuk membuat sistem pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahmansyah, dkk. (2020). "Perbandingan Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan dan Implementasi)". Palembang: Anugrah Jaya.

- Adriono, dkk. (2011). "Jejak Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011)".
- Amnur, M., & Muhdi, A. (2007). "Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional". Yogyakarta: Pustaka Fahim.
- Arsilawita, dkk. (2021). "Sistem Pendidikan Inggris Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0". Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1).
- Department for Education. (2020). "The National Curriculum". Retrieved from <https://www.gov.uk/national-curriculum>
- Dye, T. R. (1981). "Public policy is whatever governments choose to do or not to do".
- Fauzi, S. (n.d.). "Sistem Pendidikan di Inggris". Kantor Atase Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London.
- Hamalik, O. (2002). "Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem". Jakarta: Bumi Aksara.
- Junus, M. (1968). "Perbandingan Pendidikan Modern Islam dan Intisari Pendidikan Barat". Djakarta: Al-Hidajah.
- Ministry of Education and Culture. (2019). "Bantuan Operasional Sekolah". Retrieved from <https://bos.kemdikbud.go.id/>
- UCAS. (2020). "Tuition Fees and Student Loans". Retrieved from <https://www.ucas.com/finance/undergraduate-tuition-fees-and-student-loans>